

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang memberikan perkembangan atau pertumbuhan kepada Negara. Karena UMKM merupakan bagian terpenting dari perekonomian suatu negara atau daerah, sehingga UMKM dapat dijadikan solusi dalam pengentasan kemiskinan di suatu negara. Menurut (Sulistiyawati, 2020) jika selain perannya untuk menumbuhkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja, UMKM juga mempunyai peran dalam pendistribusian hasil pembangunan. UMKM dapat menjadi gambaran usaha kecil yang mampu berkembang dengan sangat pesat jika dalam pengelolaan yang baik dan benar. Tidak memungkinkan beberapa usaha bisa mengalami perkembangan yang kurang baik yang terkendala akibat permasalahan dalam permodalan karena kurang terpenuhinya syarat untuk melakukan pengajuan pinjaman kepada pihak kreditur (perbankan).

Beberapa pemilik usaha terkadang tidak memiliki wawasan mengenai bagaimana mengatur pengelolaan arus kas perdagangan, hal ini yang menyebabkan beberapa usaha yang mengakibatkan kebangkrutan. Kebangkrutan UMKM yang diakibatkan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki pengusaha dalam bidang akuntansi (Nurfadilah et al., 2019). Oleh sebab itu, diperlukannya niat dan perilaku dari pelaku UMKM untuk menerapkan pencatatan keuangan dalam mengembangkan usahanya. Laporan keuangan merupakan hal penting dalam mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan

oleh pelaku UMKM. Dalam hal ini kesiapan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan juga berperan penting dalam permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, jika pelaku UMKM tidak memiliki kesiapan maupun pengetahuan yang dimilikinya maka akan sangat sulit dalam menerapkan pencatatan keuangan dalam usahanya. Hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (Sururudin, 2017).

Menurut (Efriyenti, 2020) pencatatan laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen usaha mikro masih jauh dalam mengikuti basis standar akuntansi keuangan yang diterapkan. Dilihat dari proses pendataan keuangan yang dilakukan oleh pemilik atau manajemen usaha mikro belum melakukan proses pencatatan laporan keuangan yang sinkron dengan siklus akuntansi yang benar, sebab pelaku usaha mikro belum mampu dalam melaksanakan pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Tidak dilaksanakannya pencatatan laporan keuangan oleh pemilik UMKM disebabkan berdasarkan pandangan pemilik UMKM jika penyusunan laporan keuangan cukup sulit jika diterapkan hingga pemahaman dari pemilik atau manajemen usaha mikro masih kurang dalam melakukan pencatatan laporan keuangan.

Tabel 1.1
Hasil Observasi Awal Yang Dilakukan Kepada 30 UMKM di Kecamatan Buleleng

Sudah Menerapkan Pencatatan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM		Ingin Mencoba Menerapkan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM	
Sudah	10	Ya	10
Belum	20	Tidak	10
Total	30	Total	20

Sumber: Data Diolah 2022

Dari table diatas mengenai survey awal dalam penerapan SAK EMKM di peroleh jumlah 20 UMKM yang belum menerapkan pencatatan laporan keuangan

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah dibandingkan dengan yang telah melakukan pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Meski demikian, dari 10 pelaku UMKM terdapat 10 pelaku UMKM yang ingin melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Hasil tersebut dapat menggambarkan jika pelaku UMKM memiliki keinginan untuk menerapkan pencatatan laporan keuangan. Namun terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh pelaku UMKM, salah satu faktor yang menyebabkan pelaku UMKM belum menerapkan pencatatan laporan keuangan yaitu dari segi kesiapan yang dimilikinya. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pardita et al., 2019) menyatakan jika kesiapan UMKM merupakan hal penting dalam mengimplementasikan pencatatan laporan keuangan, semakin tinggi tingkat kesiapan pelaku UMKM maka semakin tinggi penerapan SAK EMKM. Sehingga variable kesiapan memiliki pengaruh positif dalam menerapkan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Dalam menunjang kinerja UMKM yang baik pelaku UMKM harus memahami bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangannya pada usahanya. Pengelolaan keuangan adalah salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu akuntansi yang dimilikinya, sehingga menyebabkan pelaku UMKM tidak mampu dalam mengelola keuangan dengan lebih baik dan hal ini yang akan mempengaruhi kinerja pada usaha mereka. Menurut (Juniariani, 2020) dalam penelitiannya mengatakan jika profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dapat membantu pelaku usaha dalam menangani pengelolaan usaha yang dimulai dengan menyusun anggaran, perencanaan simpan pinjam dana usaha hingga pengetahuan

dasar atas keuangan dalam mencapai tujuan keuangan usaha. Dalam Handayani menurut (D. P. Sari, 2013) untuk menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dan pemegang ekuitas maka suatu perusahaan perlu mengimplementasikan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga pelaku UMKM dapat memenuhi syarat dalam memperoleh kebutuhan modal dari pihak eksternal dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak pemberi modal. Penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM juga berfungsi sebagai pemisah antara keuangan perusahaan dan uang pribadi dari pemilik.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi UMKM Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 2009 melakukan penyusunan dan pengesahan Standar yang diperoleh dari *International Financial Reporting Standard for Small Medium Enterprises* (IFRS for SMEs) atau yang dikenal dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP). Namun pada tanggal 24 Oktober 2016 SAK ETAP diubah menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang di dalamnya terdapat konsep yang mudah untuk dipahami dan dapat dikatakan sederhana jika dibandingkan dengan SAK ETAP.

Penyusunan dan pembuatan SAK EMKM ini didasarkan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Standar ini dibuat untuk dapat mempermudah UMKM dalam menerapkan akuntansi yang telah sesuai dengan standar. Dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai SAK, maka perlu dilakukannya sosialisasi untuk membantu meningkatkan wawasan yang dimiliki oleh seorang pengusaha sehingga dapat lebih siap untuk menerapkan akuntansi pada usahanya.

Menurut Data Bank Indonesia Provinsi Bali yang dikutip melalui (<https://balipost.com>) menunjukkan jika UMKM memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional maupun Bali, sebagaimana tercermin pada besarnya jumlah UMKM, yaitu mencapai 99% dari jumlah usaha nasional maupun di Bali dan besarnya tenaga kerja yang bekerja pada usaha UMKM (97,05%). Dalam hal ini dapat dibuktikan melalui data yang diperoleh melalui (<https://balitbang.bulelengkab.go.id>) jika UMKM pada setiap Kabupaten mengalami peningkatan.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Umkm Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jembrana	20.512	10.071	10.525	27.654	24.346
2	Tabanan	20.032	38.690	38.980	41.459	42.744
3	Badung	26.863	26.863	17.754	19.688	19.261
4	Gianyar	91.511	91.511	91.511	75.412	75.482
5	Klungkung	9.712	9.712	9.712	11.761	14.584
6	Buleleng	11.196	11.196	31.563	34.552	34.374
7	Bangli	35.263	42.924	43.948	44.068	44.068
8	Karangasem	38.954	28.989	38.954	39.551	40.068
9	Denpasar	11.515	30.694	30.840	31.826	32.026
BALI		265.558	290.650	313.787	325.971	327.353

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali (2020)

Perkembangan UMKM juga sangat dirasakan khususnya di Kabupaten Buleleng yang mengalami peningkatan sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2020. Dalam hal ini banyak masyarakat yang mendirikan sebuah usaha baik dalam bidang UMKM, Perdagangan dan Industri. Semua jenis UMKM ini memiliki potensi yang tinggi dalam memberikan peluang untuk setiap orang yang akan menjalankan usaha. Jika usaha tersebut di

kelola dengan berdasarkan SAK EMKM yang baik maka akan menjadikan usaha yang unggul. Berikut merupakan perkembangan UMKM di Kabupaten Buleleng tahun 2020.

Tabel 1.3
Perkembangan Jumlah UMKM Berdasarkan Klasifikasi Usaha Kabupaten Buleleng Tahun 2018 s/d 2020

No	Klasifikasi Usaha	2018	2019	2020
1	Usaha Mikro	25.202	26.048	44.670
2	Usaha Kecil	9.140	9.294	9.576
3	Usaha Menengah	193	196	226
4	Usaha Besar	17	17	17
Jumlah		34.552	35.555	54.489

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng

Berdasarkan table 1.1 data yang diperoleh melalui Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah menyatakan jika jumlah usaha pelaku sektor UMKM di Provinsi Bali setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Melihat perkembangan yang terjadi khususnya pada UMKM Kabupaten Buleleng, dilihat dari beberapa jenis sektor usaha yang ada dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga 2020. Berikut merupakan data yang diperoleh melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.4
Data Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Usaha Kabupaten Buleleng Tahun 2018 s/d 2020

No	Jenis Usaha	2018	2019	2020
1	Perdagangan	26.998	27.713	42.337
2	Perindustrian	3.447	3.617	6.433
3	Pertanian dan Non Pertanian	2.436	2.510	2.886
4	Aneka Jasa	1.671	1.715	2.853
Jumlah		34.552	35.555	54.489

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng

Dapat dilihat melalui table 1.2 semua sektor UMKM yang terdapat di Kabupaten Buleleng mengamali peningkatan setiap tahunnya. Hal ini berarti

memberikan kontribusi bagi kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto). Dikutip melalui laman (<https://www.bps.go.id>) perekonomian Indonesia pada tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) yakni mencapai Rp.15.434,2 triliun, dan PDB per kapita mencapai Rp. 56,9 Juta atau US\$3.911,7. Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan dengan tahun 2019.

Melihat perkembangan yang terjadi khususnya pada UMKM Kabupaten Buleleng, pelaku usaha harus bisa melakukan pencatatan akuntansi berbasis SAK EMKM dalam membantu mengembangkan usaha yang dijalankannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pramudya, 2021) mengatakan jika berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi daerah Kabupaten Buleleng sebelum terjadinya Covid-19 UMKM di Kabupaten Buleleng telah mengalami kesulitan dalam mengakses modal sebanyak 45,71%. Namun, setelah Covid-19 kesulitan dalam mengakses modal pada UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan menjadi 71,4%. Maka dapat disimpulkan terjadi peningkatan kesulitan modal UMKM di Kabupaten Buleleng meningkat sebesar 25,7%. Hal ini menyatakan jika sangat diperlukannya upaya strategis bagi para pelaku UMKM bisa mengakses modal terhadap perbankan yaitu salah satunya dengan memiliki laporan keuangan yang berkualitas yang sesuai berdasarkan SAK EMKM.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ni Kadek Dewi Astriani, 2017) menyatakan jika Kabupaten Buleleng termasuk jumlah pendudukan yang tinggi dan memiliki peluang usaha untuk lebih dikembangkan setelah Kecamatan

Gerokgak ialah Kecamatan Buleleng. Hal ini dapat dipahami pada table berikut ini.

Tabel 1.5
Rekap Jumlah Penerbitan IUMK Tahun 2018 s/d 2021
Per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah
Buleleng	634
Gerokgak	977
Busungbiu	282
Sukasada	347
Seririt	233
Tejakula	442
Banjar	259
Sawan	302
Kubutambahan	169

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UMKM Kabupaten Buleleng

Tingginya jumlah UMKM pada Kecamatan Buleleng disebabkan Kecamatan Buleleng merupakan sentra dan pusat kota di Kabupaten Buleleng. Segala aktivitas usaha dan segala kegiatan dalam berbagai bidang UMKM lebih berkembang pesat di Kecamatan Buleleng. Perkembangan UMKM pada Kecamatan Buleleng kinerjanya sangat diperhatikan, sebab terjadi banyak aktivitas yang dilakukan salah satunya yaitu promosi dalam memperkenalkan UMKM melalui pameran dan festival budaya yang rutin dilakukan di Kecamatan Buleleng (Vijaya, D., & Irwansyah, 2017).

Dalam menerapkan pencatatan akuntansi dibutuhkannya kesiapan oleh pelaku UMKM dalam melaksanakan pencatatan laporan keuangan berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh IAI yaitu SAK EMKM. Kesiapan merupakan hal penting untuk melaksanakan pencatatan akuntansi, jika pelaku usaha telah memiliki kesiapan maka pencatatan laporan keuangan akan berjalan dengan baik sehingga bisa membantu perkembangan usaha sebab laporan keuangan adalah hal

pokok atau hasil akhir pada suatu proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para penggunanya sebagai salah satu bahan untuk proses pengambilan keputusan dan juga dapat menjelaskan indikator kesuksesan suatu usaha dalam mencapai tujuannya (Setiawan, 2018).

Menurut Sanusi (2005:222) dalam (Lailiyah & Nuraini, 2020) “kesiapan adalah kesediaan individu dalam melakukan sesuatu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Puspasari, 2016) kesiapan UMKM dalam melakukan penerapan standar akuntansi keuangan dapat diperoleh dari pemahaman pelaku usaha mengenai standar akuntansi keuangan, apakah pelaku usaha telah menerapkan pembukuan secara berskala, tersedia karyawan khusus pembukuan, adapun *software* akuntansi, hingga pembukuan yang berpedoman pada standar akuntansi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2019) menyatakan bahwa dalam penelitiannya terdapat 3 UMKM pada obyek penelitiannya belum memiliki kesiapan dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pardita et al., 2019) mengatakan jika dalam penelitiannya pelaku UMKM berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM.

Dalam menunjang kesiapan UMKM dalam melakukan penerapan SAK EMKM diperlukannya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian mengenai SAK EMKM. Secara praktis sosialisasi dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan pelaku usaha pada area yang telah ditentukan untuk melakukan pembahasan terkait penerapan SAK EMKM dalam pembuatan laporan keuangan bagi pelaku UMKM. Kegiatan sosialisasi tersebut sangat perlu dilakukan untuk memberikan wawasan kepada pelaku usaha, karena

menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM dapat membantu pelaku usaha dalam masa sulit seperti kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Mattoasi, Usman, 2021) menyatakan jika sosialisasi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyawati, 2020) menyatakan jika pemberian sosialisasi tidak memiliki pengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Kesiapan pelaku UMKM dalam melakukan penerapan SAK EMKM merupakan kemampuan individu dalam menggolongkan, mengikhtisarkan pencatatan serta penyajian isi dari laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dalam menghasilkan kinerja yang baik pelaku UMKM mengetahui bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan benar, jika aspek keuangan semakin baik maka kinerja UMKM yang dihasilkan akan semakin meningkat (Juniarini, 2020). Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukannya sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang akuntansi. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kompetensi yang memiliki keterkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang berpengaruh secara lanjut mengenai kinerjanya (Eka Rosalina, Fera Sriyunianti, 2021).

Kompetensi sumber daya manusia adalah salah satu penyebab yang berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Hal ini disebabkan oleh unit usaha yang ditentukan dengan bagaimana individu-individu yang berpartisipasi dalam mengelola usaha (Juniarini, 2020). Untuk mengasah kompetensi sumber daya manusia perlu diadakannya pelatihan dan pendidikan dalam bidang akuntansi.

Pelatihan akuntansi sangat penting dilakukan dalam menjalankan sebuah usaha, sebab untuk mengelola UMKM diperlukan seseorang yang memiliki pengetahuan dalam melakukan pencatatan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan sehingga mampu melakukan kontrol dan mampu meningkatkan kapasitas kinerja karyawan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ismunawan, 2020) bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan.

Menurut Richer dalam (Lutfiany, 2018) mengatakan bahwa implemtasi mengenai SAK EMKM juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pemilik UMKM sendiri. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pemilik maupun manajer perusahaan menengah maupun kecil kini sangat ditentukan oleh pendidikan yang pernah ditempuhnya baik itu formal maupun non formal. Direktur LLP-KUKM, (Larasati & Farida, 2021) menyatakan pernyataan jika pelaku UKM di Indonesia dasar pendidikan yang ditempuhnya hanya SD dan SMP, yaitu 60-70% dari jumlah UKM, dalam permasalahan ini memiliki pengaruh yang sangat besar dengan pendidikan yang masih rendah oleh sebab itu kemampuan beradaptasi dengan perubahan akan lebih sulit.

Pada dasarnya tingkat pendidikan yang ditempuh dan dimiliki oleh seseorang adalah usaha yang dapat dilakukan dalam memperoleh kinerja yang baik (Arismawati et al., 2017). (Ramadhani et al., 2018) mengatakan jika pendidikan pemilik atau manajer perusahaan sangat mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi sebab pemilik UKM sangat dominan dalam menjalankan usahanya. Pendidikan formal yang pernah ditempuh sangat menentukan kemampuan dan keahlian pelaku UMKM sebab UMKM cenderung tidak mampu dalam mempergunakan tenaga professional akuntansi sebagai tenaga

kerja ataupun jasa akuntansi. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Farina, 2021) menyatakan jika pelatihan penyusunan laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Sedangkan penelitian mengenai pendidikan yang dilakukan oleh (Adino, 2019) mengatakan jika tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap pemahaman pelaku UMKM mengenai SAK EMKM. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azmi, 2019) bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap UMKM terkait pentingnya laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Kadek Eny Suastini, dkk (2018) menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperbanyak variable selain kualitas sumber daya manusia dan ukuran usaha seperti variable pemberian informasi dan sosialisasi. Maka dari itu sesuai dengan saran penelitian tersebut kebaruan dalam penelitian ini adalah pada variable Kesiapan, Sosialisasi, Pelatihan dan Pendidikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Theory of Planned Behavior* dan Teori Entitas yang memiliki keterkaitan dengan niat dan perilaku seseorang dalam melakukan suatu aktivitas seperti melakukan penerapan SAK EMKM yaitu melakukan pencatatan transaksi yang dipertanggungjawabkan dalam suatu entitas atau UMKM.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik memilih Kecamatan Buleleng dan peneliti tertarik dalam melakukan penelitian kembali mengenai kendala yang dialami oleh pelaku UMKM dengan mengaitkan variable-variabel bebas yang telah dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan tersebut

mengenai bagaimana “**Pengaruh Kesiapan, Sosialisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelatihan Dan Pendidikan Terhadap Penerapan SAK EMKM Pada UMKM Di Kecamatan Buleleng**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dalam latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu:

1. Kesadaran yang dimiliki oleh pelaku UMKM masih kurang dalam melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Dengan tersedianya laporan keuangan merupakan hal penting bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan dalam melakukan pengelolaan usahanya.
2. Dengan banyaknya kendala yang dialami oleh pelaku UMKM seperti minimnya wawasan mengenai akuntansi, sosialisasi yang belum merata dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan, kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan keuangan yang mampu menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar SAK EMKM, hingga pelatihan dan pendidikan yang kurang dalam bidang akuntansi.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini perlu dilakukan agar tidak keluar batas dari pokok-pokok permasalahan sehingga nantinya permasalahan dapat tertuju dan dijelaskan secara terstruktur. Maka dalam permasalahan ini peneliti akan membahas mengenai pengaruh kesiapan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia,

pelatihan dan pendidikan terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesiapan berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Kecamatan Buleleng?
2. Apakah sosialisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Kecamatan Buleleng?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Kecamatan Buleleng?
4. Apakah Pelatihan dan Pendidikan berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Kecamatan Buleleng?
5. Apakah kesiapan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia serta pelatihan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Kecamatan Buleleng?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan terhadap penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Kecamatan Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Kecamatan Buleleng.

3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Kecamatan Buleleng.
4. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pendidikan terhadap penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Kecamatan Buleleng.
5. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia serta pelatihan dan pendidikan terhadap penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Kecamatan Buleleng.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka terdapat manfaat yang bisa di peroleh dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu akuntansi dan memberikan wawasan khususnya dalam pengaruh kesiapan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan terhadap penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Penelitian ini memiliki hubungan dengan mata kuliah akuntansi koperasi dan UMKM, lebih tepatnya membahas mengenai laporan keuangan UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta informasi kepada UMKM dalam penerapan SAK EMKM untuk menunjang kinerja UMKM, sehingga memberikan perkembangan usaha yang baik dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, diharapkan mahasiswa/i mampu mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan untuk mengkaji dan memahami permasalahan-permasalahan yang muncul dalam perkembangan UMKM khususnya di dalam melakukan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah pengetahuan mahasiswa mengenai penerapan SAK EMKM bagi pelaku UMKM.

